

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Mustari Pide, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta, Radar Jaya Pratama.
- Aminuddin Iimar, 2004, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- A.Hamid S. Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara" (Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA-PELITA), Disertasi Doktor Universitas Indoensia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta Raja, Grafindo Persada.
- Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hanif Nurcholis, 2007 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Ismail Suny, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru.
- Muhammad Endriyo Susila dkk, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penuisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika,
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi.
- Kristoforus Thadeus Jeo, "Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004" (Thesis Universitas Udayana, Denpasar, 2010).
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Bandung, Mizan Pustaka.
- Manan Bagir, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, Armico.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar lampung.

- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Safri Nugraha dkk, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, CLGS-FHUI.
- SF. Marbun dan Moh. Mahmud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Admnistrasi Negara*, Yogyakarta Liberty.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, bandung, Sinar Grafika.

### **Internet**

- Febian Januarus Kuwado, Mendagri Tak Akan Ubah Keputusannya soal Status Ahok, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/13393201/mendagri.ta.k.akan.ubah.keputusannya.soal.status.ahok.>, diakses tanggal 15 juli 2017 pukul 21.30 WIB.
- Sabrina Asril, “Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum”, 4 September, 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum.>, diakses tanggal 8 juli 2017 pukul 08.00 WIB.

### **Kamus**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

### **Jurnal**

- Ansorullah, “Reformasi Pilkada Langsung, Artikel”, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume III Nomor 2, November 2010.
- Cecep Effendi, “Evaluasio Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol. 2 Nomor 2, Juni 2005.
- Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 2 Nomor 2, Juni 2005
- Zainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010
- Haryadi, Achmad Dodi. “Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional”, Jurnal Konstitusi Nomor 72 ,Februari 2013.
- Andi Pitono, Jurnal. “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 03, Nomor 1. Maret 2012.

- Eko Noer Kristiyanto, Jurnal. "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah". Jurnal Rechts Vinding, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012.
- Sudharto, "Kajian Keberadaan Propinsi Dalam Penguatan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Ahmad Sutrisno, "Kebijakan Politik Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.
- Imran, "Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif)", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.